



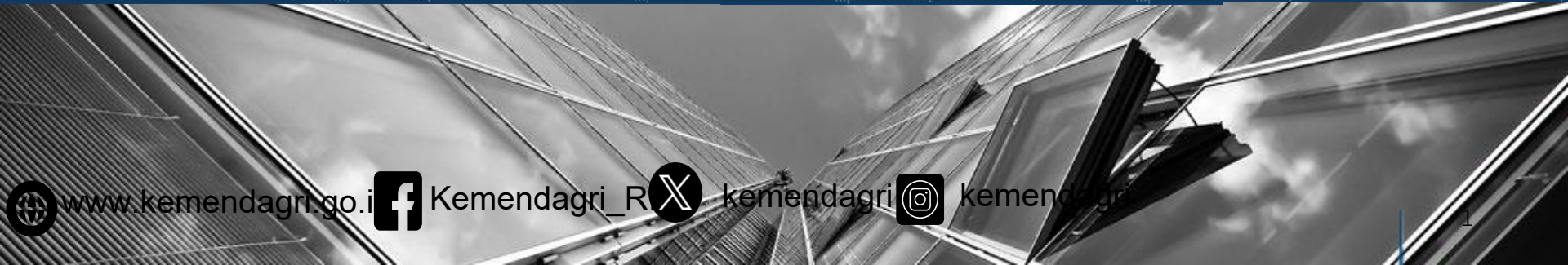
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LAUNCHING PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 24 TAHUN 2024

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan
Pengelolaan Perkotaan

Oleh:
Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI
Jakarta, 23 Januari 2025





HANYA 1 DARI 3 PENDUDUK INDONESIA YANG AKAN TETAP TINGGAL DI DESA PADA TAHUN 2035



Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 diketahui bahwa 56.7% memilih menetap di daerah perkotaan. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga tahun 2035 menjadi 66,6% artinya penduduk rural (pedesaan) hanya tersisa sekitar 33.4% saja

Mengapa masyarakat meninggalkan desa?

- Kesempatan Kerja
- Pendidikan dan Kesehatan
- Infrastruktur dan Aksesibilitas
- Kemajuan Teknologi
- Perubahan Sosial dan Gaya Hidup



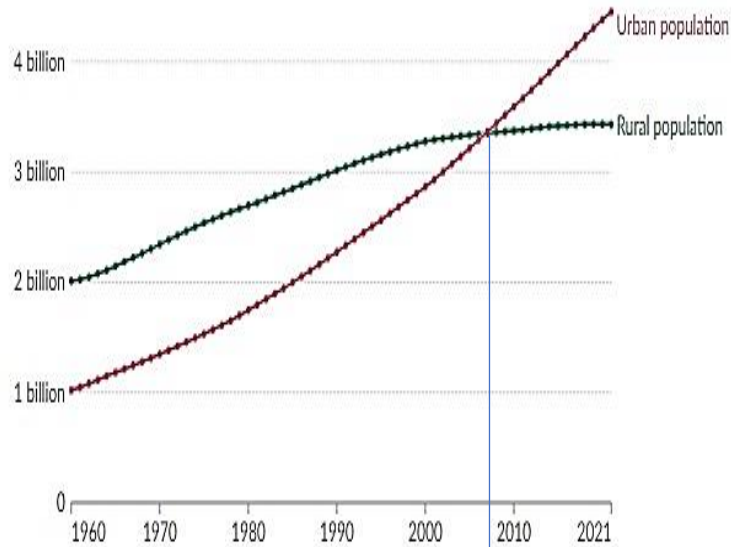
Perkembangan Perkotaan



Global

Number of people living in urban and rural areas, World

Our World
in Data



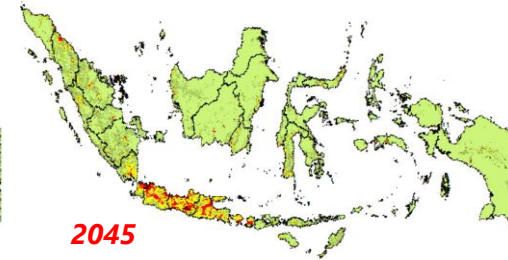
Secara global populasi perkotaan melebihi pedesaan untuk **Pertama kalinya** 2007

- Share penduduk **perkotaan global** diperkirakan **meningkat** dari 56% pada tahun 2021 menjadi **68% pada tahun 2050**, di mana **95 persen** **pertambahan** tersebut berada di negara **emerging economies** (Asia & Afrika) (Bank Dunia, 2021)
- Penduduk perkotaan di **negara emerging economies**. tengah **menghadapi tantangan** :(1) kemiskinan dan kesenjangan; (2) pemenuhan infrastruktur dasar, perumahan dan permukiman kumuh; (3) perubahan iklim; (4) optimalisasi bonus demografi; (5) Pengembangan kota sedang, kecil dan menengah yang layak berkelanjutan (Wahaba, Sameh at all . 2020)

Indonesia



2019



2045

- Diprediksi pada tahun **2045** jumlah penduduk Indonesia mencapai **324,05 juta jiwa**, dimana jumlah penduduk perkotaan sebanyak **236,24 juta jiwa (72,9 %)** (BPS, 2023).
- Di setiap pulau, **proporsi penduduk perkotaan pada tahun 2045** diperkirakan **sudah diatas 50%** dari jumlah penduduk pulau tersebut, kecuali Maluku



- Laju pertumbuhan ekonomi **Indonesia** akibat peningkatan urbanisasi **hanya 1,4%** pertumbuhan PDB perkapita untuk setiap 1% pertumbuhan urbanisasi. Sedangkan **Tiongkok** memperoleh 3% dan 2,7% untuk kawasan Asia timur & Pasifik (World Development Indicators, 2021)



Kontribusi Perkotaan Terhadap Perekonomian Indonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



42.44%

**42.44% TOTAL
KONTRIBUSI KOTA
TERHADAP
PEREKONOMIAN
INDONESIA**

*Dihitung berdasarkan data BPS, PDRB ADHK, dengan memasukan 5 Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

Urgensi Pengelolaan Perkotaan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Luasnya Hanya

1%

Dari Total Luas
Permukaan Bumi



Tempat tinggal bagi

50%

Populasi
Penduduk Dunia



Tempat dimana

80%

PDB Dunia diproduksi



Mengkonsumsi

78%

Sumber Daya /
Energi Global





Urbanisasi berdampak kepada peningkatan kebutuhan layanan publik seperti: rumah sakit, sekolah, sanitasi, transportasi publik, tempat rekreasi, dsb

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

- **Fasilitas publik belum merata:** Beberapa wilayah perkotaan masih mengalami kekurangan fasilitas publik yang memadai, terutama di daerah-daerah kumuh, pinggiran, Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- **Kualitas dan standar layanan masih rendah:** Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas dan standar fasilitas publik adalah kurangnya anggaran, SDM, perawatan, dan pengawasan pemanfaatan.
- **Rendahnya ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam:** kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah terkait dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap fasilitas publik. Rendahnya ketahanan dan adaptasi fasilitas publik dapat meningkatkan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim dan bencana alam.





Integrasi Layanan

Kurang terintegrasinya proses penyediaan layanan baik antar sektor, antar lintas kewenangan termasuk layanan yg dikelola badan hukum, maupun antar antardaerah pada kawasan perkotaan yang berada pada dua atau lebih daerah yang berbatasan



Pengelola Swasta

- Pengelolaan layanan oleh badan hukum swasta seringkali terlalu profitable
- Kawasan perkotaan terencana yang dibangun oleh badan hukum swasta kurang terintegrasi

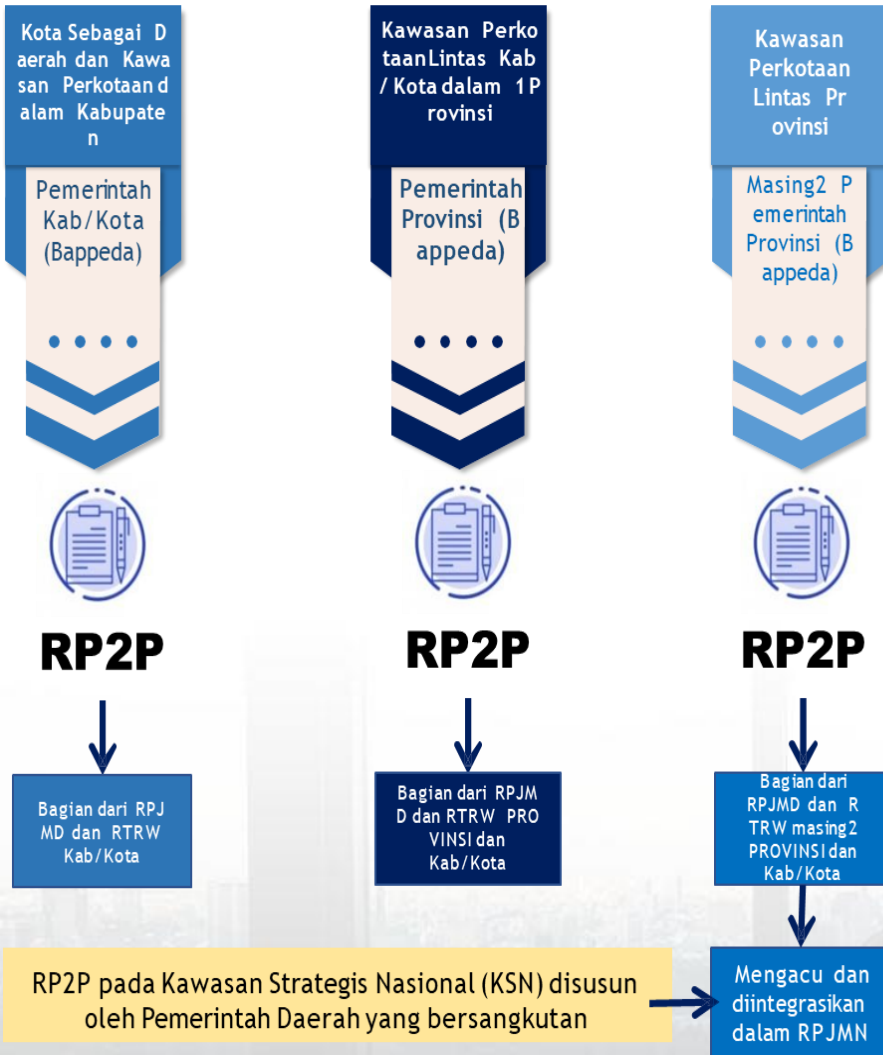


Pelayanan

- Pelayanan perkotaan fokus pada penyediaan fasilitas fisik, pengelolaan dan pemeliharaan terabaikan
- Penyediaan layanan berdasarkan prespektif penyedia layanan, tidak berbasis kebutuhan warga kota

Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan

- Rencana penyediaan layanan perkotaan;
- Rencana pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan;
- Rencana pembinaan SDM dalam penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan;
- Rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas.



Rencana Pendanaan Indikatif

Merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem pelayanan perkotaan

Memperhatikan:

- Capaian SPP
- Keuangan dan inovasi pembiayaan daerah
- Potensi kerja sama daerah
- Bentuk perkotaan dan
- Klasifikasi perkotaan.

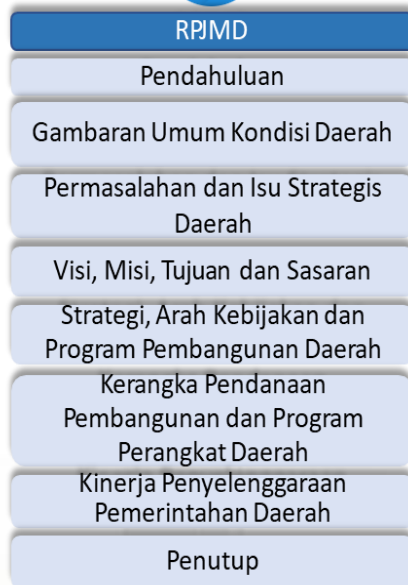


INTEGRASI RP2P KE DALAM RPJMD DAN RTRW



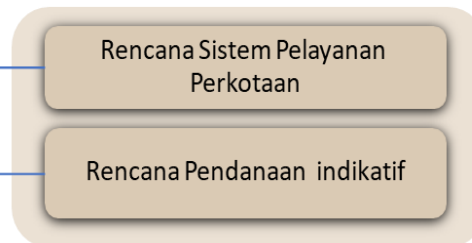
Lanjutan..

RENCANA PEMBANGUNAN (Permendagri 86 / 2017)



RP2P Merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah

RP2P

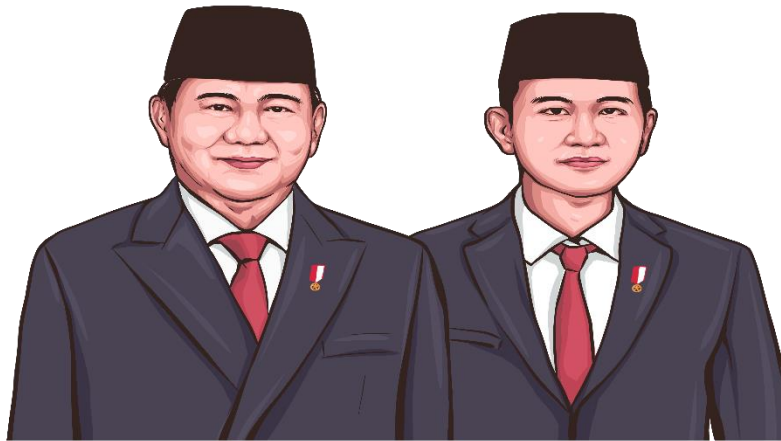


RENCANA TATA RUANG WILAYAH (PP 21 / 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang)



RP2P Mendukung Asta Cita

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



**PRABOWO
GIBRAN** 2024
BERSAMA INDONESIA MAJU

VISI DAN 8 MISI ASTA CITA

VISI | Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

8 MISI ASTA CITA



Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penerapan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) akan **sejalan dan mendukung program *Asta Cita*** Pemerintah ah. sesuai **Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan**, dan **Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

10

“Pemerintah Daerah wajib Menyusun RP2P menjadi bagian dari RPJMD dan RTRW untuk mewujudkan perkotaan berkelanjutan dengan fasilitas pelayanan lengkap, terstandarisasi, dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemangku kepentingan”



Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM
Wakil Menteri Dalam Negeri





TERIMA KASIH